

## Standar Akuntansi: Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas

Dwi Martani\*

Staf Pengajar Akuntansi Fakultas Ekonomi UI, Anggota Tim Implementasi IFRS

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi keuangan pada satu waktu tertentu dan kinerja suatu entitas pada suatu periode. Untuk keseragaman dalam penyusunan laporan dan memudahkan pembaca, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tujuan laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.

**Kata kunci:** laporan keuangan, standar akuntansi, PSAK, PSAP, PSAK ETAP, PSAK Syariah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi agar terdapat keseragaman sehingga pembaca laporan dapat dengan mudah membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Standar akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Bagi auditor yang memeriksa laporan keuangan, standar digunakan sebagai dasar untuk memberikan opini auditor. Laporan auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dituangkan dalam standar akuntansi. Pembaca laporan keuangan juga harus memahami standar akuntansi keuangan untuk dapat membaca laporan keuangan. Standar memuat asumsi, prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Ketidaktahuan standar dapat membuat pembaca salah menginterpretasikan angka-angka dalam standar tersebut.

Standar akuntansi yang saat ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia ada empat yaitu:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ETAP)

\*) Dosen Senior Departemen Akuntansi FEUI. Ketua Departemen Akuntansi, Anggota Tim Implementasi IFRS, Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemateri dalam berbagai sosialisasi dan workshop terkait dengan akuntansi untuk swasta dan pemerintahan. Peneliti di bidang akuntansi keuangan, pasar modal, perpajakan dan akuntansi sektor publik.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Keempat standar tersebut digunakan untuk entitas yang berbeda tergantung kebutuhannya.

Standar akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*). Tujuan umum maksudnya untuk memenuhi kebutuhan sebagian pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam standar disebutkan pemakai ini meliputi kreditur, investor, manajemen dan pemakai lainnya. Entitas dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan khusus, misalnya laporan keuangan yang disusun dalam rangka pembubaran usaha, akuisisi perusahaan dan ekspansi bisnis. Laporan keuangan untuk tujuan khusus tidak perlu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, namun dapat disusun berdasarkan asumsi dan cara penilaian, pengukuran dan penyajian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai.

### PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas signifikan, yaitu perusahaan yang menjual surat berharganya pasar modal (termasuk dalam proses untuk menjual), perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat dan perusahaan BUMN. Standar ini dapat diterapkan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Namun perlu dipertimbangkan biaya dan manfaat dari penerapan PSAK ini untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, karena penggunaan PSAK adopsi penuh IFRS lebih sulit dibandingkan dengan PSAK yang lama.

PSAK disusun dengan mengadopsi *International Financial Reporting Standar* (IFRS). IFRS merupakan standar akuntansi global yang berlaku lebih dari 130 negara. Standar akuntansi ini awalnya bernama *International Accounting Standard* (IAS) disusun oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC). Sejak tahun 2005 dirubah organisasinya menjadi *International Accounting Standard Board* dan standar baru yang dikeluarkan bernama IFRS. Semua IAS dianggap menjadi bagian dari IFRS tanpa mengganti namanya.

Proses adopsi penuh PSAK oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah dimulai sejak tahun 1994, namun DSAK setelah tahun tersebut tidak konsisten dalam melakukan adopsi IAS sehingga memasukkan referensi standar lain seperti US GAAP dan menyusun beberapa standar industri. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2008 telah mencanangkan bahwa Indonesia akan mengadopsi penuh IFRS tahun 2012. Beberapa standar bahkan telah mulai direvisi untuk disesuaikan dengan IFRS dan ada beberapa yang mulai berlaku efektif tahun 2008, misalnya PSAK 16 aset tetap, PSAK 13 Properti Investasi dan PSAK 30 Sewa. Sampai pertengahan 2011 masih ada beberapa IAS/IFRS yang belum diadopsi. IAS 41 mengenai *Agriculture* termasuk standar akuntansi yang sampai

54 pertengahan tahun 2011 belum diputuskan akan diadopsi atau tidak di tahun 2012. Standar ini mengatur tentang akuntansi untuk produk agrikultur dan aset biologi, yang menurut IAS 41 harus diukur dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Standar ini menimbulkan kontroversi karena kesulitannya dalam penerapan, untuk itu DSAK menunggu keputusan IASB terkait standar ini, jika ada wacana untuk dirubah, maka adopsi IAS 41 dilakukan setelah perubahan dilakukan.

PSAK memiliki tiga ciri yang pada satu sisi dianggap sebagai kelebihan namun di sisi lain ciri tersebut justru menyulitkan dalam perapannya. PSAK banyak menggunakan nilai wajar dalam penilaian aset dan kewajiban dalam neraca. Aset tetap dan properti investasi diperkenankan menggunakan nilai wajar sebagai pilihan penilaian selain menggunakan harga perolehan. Piutang dan utang diperhitungkan dengan menggunakan bunga efektif pada saat penerbitan dengan memperhitungkan biaya penerbitannya. Penggunaan nilai wajar mengatasi kelemahan akuntansi yang banyak menggunakan harga perolehan sebagai dasar penilaian. Nilai wajar membuat laporan keuangan memiliki nilai relevansi yang lebih tinggi sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun penggunaan nilai wajar untuk aset yang tidak memiliki harga pasar aktif juga akan menyulitkan dalam perhitungan penilaian dan dapat menimbulkan bias dalam penilaian.

PSAK berbasis IFRS merupakan standar yang bersifat *principle based*. Standar hanya mengatur kaidah pokok dan tidak mengatur persyaratan detail sesuai dengan realitas ekonomi transaksi tersebut. Keunggulan standar yang bersifat *principles based*, membuat standar diterapkan dengan mengikuti substansi ekonomi. Standar yang bersifat *rule based*, dapat menimbulkan *moral hazard* para penyusun laporan keuangan untuk merancang transaksi untuk memenuhi aturan atau *rule* dalam standar. Penerapan *principles based standard*, membutuhkan *professional judgment* karena pemakai harus menguji setiap kejadian apakah memenuhi kaidah prinsip dalam standar tersebut sebelum memutuskan penerapannya.

PSAK mensyaratkan pengungkapan yang lebih banyak dan luas. Pengungkapan diperlukan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemakai, sehingga pemakai memperoleh data yang lengkap sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Pengungkapan dapat berupa tambahan rincian data yang lebih detail dan pemberian informasi kualitatif lain yang mendukung informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

### PSAK Syariah

PSAK Syariah diterapkan untuk suatu entitas yang melakukan transaksi berbasis

55 syariah. Standar ini hanya mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi, sehingga standar terbagi sesuai dengan transaksi yang lazim ada dalam bisnis syariah seperti akuntansi *murabahah*, akuntansi *mudharabah*, akuntansi *ijarah* dan akuntansi *salam*. Walaupun PSAK ini memiliki kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, namun kerangka tersebut hanya memberikan dasar konseptual perlakuan transaksi syariah. Dalam standar akuntansi syariah tidak ada ketentuan penyajian laporan keuangan dan pengaturan detail untuk akun-akun tertentu dan pelaporan untuk kondisi tertentu.

Dalam penerapannya akuntansi syariah ini dikombinasikan dengan PSAK dan PSAK ETAP. Untuk perusahaan yang memiliki transaksi syariah dan akuntabilitas publik signifikan menggunakan PSAK dan PSAK Syariah, misal Bank Muamalat, Syariah Mandiri, Asuransi Takaful. Namun khusus untuk BPR, oleh Bank Indonesia diperbolehkan menggunakan PSAK ETAP. BPR dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan PSAK Syariah dan PSAK ETAP. Penggunaan dua standar dalam pelaporan ini harus dijelaskan dalam opini audit, karena audit ditujukan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang digunakan untuk menyusunnya.

Penerapan PSAK Syariah ini seringkali menjadi tidak dapat secara konsisten diterapkan dalam entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasi atau digabungkan. Misalnya sebuah unit syariah di sebuah Bank konvensional, PSAK syariah digunakan sebagai standar dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi syariah di unit syariahnya. Namun dalam laporan keuangan induk atau kantor pusat, penyajian akun syariah terkadang digabungkan menjadi satu dengan akun konvensional. Contoh, pendapatan bagi hasil digabungkan dengan pendapatan bunga, jika komponen pendapatan bagi hasil nilainya tidak material.

### PSAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

PSAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. PSAK ini efektif diterapkan tahun 2009. Untuk perusahaan yang sampai tahun 2011 tetap menggunakan PSAK dan tidak berganti menggunakan PSAK ETAP, maka pada tahun berikutnya tidak boleh lagi berpindah menggunakan PSAK ETAP. Standar ini merupakan alternatif pemecahan masalah bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, mengingat PSAK sangat sulit diterapkan dan dinamis dengan perkembangan dan perubahan.

PSAK ETAP diadopsi dari *IFRS for Small Medium Enterprise*. Adopsi yang dilakukan tidak semuanya, ada beberapa bagian standar yang tidak diadopsi seperti instrumen keuangan, penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Alasan

PSAK ETAP ini tidak diadopsi adalah karena bagian standar tersebut terlalu kompleks untuk diterapkan perusahaan menengah dan kecil di Indonesia. Padahal pemahaman ETAP tidak sama dengan perusahaan menengah dan kecil saja. Perusahaan besar yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap dapat menggunakan PSAK ETAP.

Saat ini ada beberapa ETAP enggan berubah dari PSAK lama menuju PSAK ETAP karena jika mengadopsi PSAK ETAP dianggap kualitas laporannya menjadi lebih rendah. Istilah entitas tanpa akuntabilitas publik memberikan kesan negatif, karena perusahaan dianggap tidak memiliki akuntabilitas publik. Namun di sisi lain ETAP juga tidak siap untuk menerapkan PSAK IFRS karena keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman IFRS dan kompleksitas dari IFRS.

Sampai sekarang sosialisasi PSAK ETAP kepada perusahaan kecil, menengah relatif masih kurang, sehingga sebagian perusahaan tidak memahami bahwa perusahaan lebih tepat menggunakan PSAK ETAP atau mengupdate standar yang dipakai dengan PSAK IFRS. Sebagian besar beranggapan bahwa entitas dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang sebelumnya dipakai yaitu PSAK lama. Hampir semua isi PSAK lama saat ini tidak berlaku dan telah digantikan dengan PSAK baru.

#### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan, digunakan oleh entitas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Standar ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan merupakan bentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut UU tersebut bentuk dan sisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang disusun oleh Komite Standar yang independen setelah mendapat pertimbangan dari BPK. Dijelaskan bahwa pengukuran dan pendapatan dalam laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual, dan paling lambat dilaksanakan 5 tahun setelah UU tersebut ditetapkan, berarti tahun 2008. UU 15 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan BPK.

Berdasarkan UU tersebut dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertugas menyusun SAP. Pada tahun 2005, keluar PP no 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini efektif digunakan oleh Pemda dan Pemerintah Pusat dalam menyusun laporan keuangan tahun 2005. Untuk menjalankan SAP tersebut

pemerintah pusat mengembangkan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data transaksi dan menyusun laporan keuangan Kementerian dan Lembaga.

Untuk pemerintah daerah, SAP diturunkan menjadi peraturan atau keputusan Menteri Dalam Negeri diantaranya adalah Permendagri 13 tahun 2006. Peraturan tersebut akan digunakan oleh masing-masing daerah sebagai acuan dalam menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi dengan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan ketentuan UU, kebijakan akuntansi harus disusun dalam bentuk Perda. Penda kemudian mengembangkan sistem akuntansi dan aplikasi sistem yang berbeda walaupun mengacu pada standar dan regulasi yang sama. Sayangnya ada beberapa ketentuan dalam Permendagri 13 tahun 2006, yang tidak sama seperti ketentuan dalam SAP. Misalnya, ketentuan mengenai jenis belanja langsung dan tidak langsung yang ada dalam Permendagri 13 tetapi tidak ada dalam SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan oleh BPK sebagai dasar memberikan opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, sampai laporan keuangan tahun 2010, opini audit LK Pemerintah Pusat adalah wajar dengan pengecualian, sedangkan LK Pemerintah Daerah, belum ada 10% yang opininya tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian. Perkembangan opini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	66%	48	10%	106	21%	499

Tabel 1 : Perkembangan Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	30	37%	0	0%	18	22%	82
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78

Tabel 2 : Perkembangan Opini Audit atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga

Sumber Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2010

Audit laporan keuangan instansi pemerintah menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Audit LK ditujukan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain opini audit laporan keuangan menghasilkan informasi temuan

58 selama proses audit. Tabel 3 berikut ini menggambarkan kelompok temuan, kasus dan nilai rupiah temuan tersebut.

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	729	556.753,42
2	Potensi Kerugian Daerah	119	370.252,49
3	Kekurangan Penerimaan	398	207.415,34
4	Administrasi	852	
5	Ketidakhematan/Pemborosan	74	95.271,76
6	Ketidakefisienan	1	4.761,60
7	Ketidakefektifan	137	195.929,84
	Jumlah	2.320	1.430.384,48

Tabel 3 Jumlah Temuan dari Audit Laporan Keuangan 2010

Sumber Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 24 menggunakan basis *cash toward actual*. Artinya, untuk transaksi terkait dengan laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas, karena anggaran disusun dengan basis kas. Sedangkan neraca disusun dengan menggunakan basis akrual. Basis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 17 tahun 2003. Untuk itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP 71 tahun 2010. Dalam PP tersebut instansi pemerintah harus menerapkan akrual paling lambat tahun anggaran 2015. Untuk itu instansi pemerintah yang telah siap menerapkan dapat mulai menerapkan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2010. Dalam SAP berbasis akrual laporan keuangan terdiri dari 7 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan. Ada tiga laporan keuangan yang baru dalam standar ini yaitu Laporan Operasi, Laporan SAL dan Laporan Ekuitas.

Standar Akuntansi dapat menjamin keseragaman penyusunan laporan keuangan sebuah entitas dengan entitas lain, pihak pembaca akan lebih mudah memahami karena disusun berdasarkan pedoman yang jelas. Namun untuk dapat memahami laporan keuangan, pembaca juga harus memahami standar akuntansi sehingga persepsi penyusun dan pembaca sama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan suatu organisasi. Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan tersebut, pemakai dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih dalam rangka pengelolaan organisasi tersebut maupun keputusan lain. Laporan keuangan bagi organisasi pemerintah juga memiliki peranan yang penting, sebab dari laporan keuangan tersebut pemerintah dapat menilai kinerja organisasi,

alokasi sumber daya sehingga dapat dijadikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan pengembangan organisasi pemerintah di masa mendatang.

59 Organisasi pemerintah merupakan unit organisasi yang sangat besar baik dari sisi total anggaran yang dikelola maupun total aset yang dimiliki. Pemerintah melakukan pengeluaran yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui belanja yang dilakukan. Dalam perekonomian, belanja pemerintah merupakan stimulus terjadinya efek *multiplier* dalam perekonomian. Semakin efisien dan efektif belanja yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang semakin tinggi.

Laporan keuangan dapat menjelaskan bagaimana realisasi anggaran yang untuk periode yang telah berjalan. Neraca pemerintah menggambarkan jumlah aset yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan umum sedangkan kewajiban menggambarkan jumlah komitmen yang harus dibayarkan oleh pemerintah di masa mendatang. Hasil operasi dapat menjelaskan efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam satu periode.

Proses akuntansi di instansi pemerintah tidak hanya berperan menghasilkan laporan keuangan, namun penyusunan laporan tersebut telah memasyarakatkan budaya akuntabilitas di instansi pemerintah. Karena setiap pelaksanaan anggaran harus dilaporkan maka setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan dan harus dibuatkan bukti dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Proses audit menghasilkan temuan yang akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya dan akan ditanyakan pada proses audit berikutnya. Beberapa temuan BPK ditindaklanjuti ke pengadilan, kepolisian dan munculnya tuntutan ganti rugi. Hal ini membuat organisasi pemerintah berjalan dengan lebih baik dan akuntabel.

### Penutup

Standar akuntansi secara umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Dengan standar akuntansi pembaca dapat dengan mudah memahami laporan keuangan dan membandingkan laporan keuangan satu entitas dengan entitas lainnya.

Untuk pemerintah, standar akuntansi telah membantu dalam menciptakan budaya akuntabilitas, sehingga pemerintah yang bersih dan sehat perlahan dapat terwujud. Akuntansi dapat juga digunakan sebagai alat untuk memberantas korupsi, jika akuntansi diterapkan dengan benar-benar dan oleh para akuntan yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

## Role of Accountants amidst Economic Turbulence:

### Evaluating Standards to Enforce and Empower Internal Corporate Accountants in Critical Decision Making

Akhir Syabani, Saras Amalia Kartika, and Siti Farida

Undergraduate Students at Department of Accounting Faculty of Economics UI

#### I. Introduction: What Happened?

The financial crisis happening in 2008 was one of the biggest failure and also the biggest crisis ever in the financial history. It was famous as the deepest economic recession ever, perhaps it was the greatest one. This crisis occurred like a "domino effect". First, there were some deregulations in banking industry. The act called The Gramm-Leach-Bliley Act in 1999 allowing banks to get back into investments, commercial banking, and insurance industry. Deregulation allowed banks to enter other industries. Some says that deregulation did not affect the financial crisis 2008, but some also says that it did affect because of the need to regulate and standardize the accounting standards and other rules according to the financial instrument.

The primary causes of the crisis were these: subprime defaults and credit defaults swaps. There were some people that refused to pay their property mortgage—those that could afford their payment but chose not to pay because, in their estimation, it did not make sense to do so. If some people had financed a house for \$400,000 and its value dropped to \$300,000 and their payment went up, they would conclude that even though they were able to afford the new higher payment, it did not make sense to pay such a high payment on a house that was now worth far less than what they owed. Rather than accept the loss, some of these people would simply abandon their home and walk away from their mortgage. This was especially true if the homeowner put down very little (or none) of their own money as a down payment so they really had none of their own money invested in the property. The only thing they loosed by abandoning their house and mortgage was a hit on their credit report—but they lose nothing. Compared to the loss of the value of their home, this was considered to be the best choice of these two options.

Unfortunately, there was securitization of creating mortgage-backed securities largely traded in the markets as they were previously considered to be very much valuable

This writing has been shown and published in *International Accounting Paper Award Competition* which held by *Gajah Mada Accounting Days 2011* in Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, and won the second prize

assets. Turned out, these derivative securities were actually crappy securities that led to a huge loss for many financial institutions. Accountants failed to state these securities in their fair value and hence, failed to inform risks related to these securities held. On the other hand, public accounting firms found nothing wrong from many financial institutions. 61

This paper is trying to see the financial crisis from the accountant perspectives. Many people tend to blame only on the public accountants or the auditors. How about the others (such as the management accountants, the internal auditors or the corporate accountants)? We have to point it out on their role along with management in decision-making process.

#### II. How Far We Have Been Through

##### II.1. Risk Reporting

The recurring collapses of big companies and crises occurred because of asymmetric information between companies and investors leads to a new challenge in financial reporting. Most of all, it redefines sufficiency of financial report to a new level with the emphasis on the risks that may arise from company's current condition. Providing an overview of company's financial condition throughout the past year is not convincing enough. Now, investors need to know exactly what risks borne by the company. Investors know and accept that there are inherent risks in the market. What they cannot and should not accept are the risks that they are not receiving important information concerning their investments<sup>1</sup>.

Full disclosure on risks cannot be ruled out. Lessons learned that most inadequacies in financial reporting amidst today's business environment are management's decisions on valuation of derivatives they hold. Corporate accountants partake in the process but somehow have little or no bargaining power before management and therefore the public forces and burden of frauds, errors, and financial risks findings rely mostly on public accountants or auditors. Yet, the role of internal corporate accountants should be reconsidered with more responsibilities; their scope and how they should gain more power from external supports in financial decision-making from management.

#### Accounting Scope and Decisions before Top Management

Accountants' main responsibilities in financial reporting, among all, are to make proper estimation, valuation, and accounting policies decisions. These are significantly critical and inevitably influence how investors and other related or concerned parties would interpret financial positions. In fact, these responsibilities are often constricted inside the

62 company. Accountants have little bargaining power to make final critical decisions and are considered as just technicians of financial reporting. Security and Exchange Committee (SEC) has released proposal of such rule entitled "Disclosure in Management's Discussion and Analysis about the Application of Critical Accounting Policies"<sup>2</sup>. This should help internal corporate accountants to re-strengthen their current position of how they involve themselves in determining standards, deciding most appropriate valuations, and urging most comprehensive disclosures as possible, and above all, convincing management to do so.

### Determining the Value of a Company

One of the most critical decisions to make for an accountant is determining the valuation methods that best describes, depicts, and communicates the nature of company's operation and achievements to concerned parties. And the debate still goes on. The controversy of the use of fair value accounting is still questionable for some people and the historical costs reliability is still defended by many experts.

Hence, the discussion of how accountants value the companies they work for should take place in a contextual circumstances. Many believe that the fair value requirement for financial institutions improves transparency and contributes to investor understanding of the risk profile of the institutions as proven by The Chartered Financial Advisor (CFA) Institute's March 2008 survey of 2,000 investment professionals. According to that survey, 74% also believe that the fair value requirement improves market integrity and helps investors understand the actual value of a company's assets and liabilities. Others have criticism that the concept of fair value accounting is correct and useful but the application during periods of crisis is problematic (Andrew R. Sorkin, "Are Bean counters to Blame?" *New York Times*, July 1, 2008). Specifically, it is said that fair value accounting has contributed greatly to the 2008 financial turmoil as mortgage-backed securities was insisted to be valued mark to market (William Isaac, former chairman of the FDIC, on Chris Isidore, [money.cnn.com/2008/10/01-news/economy/mark\\_to\\_market](http://money.cnn.com/2008/10/01-news/economy/mark_to_market)). The proposed solution to help accountants do the valuation is by using hybrid system that incorporates both models: fair value accounting but also considers the use of historical costs as inputs in certain circumstances<sup>3</sup>.

### Risks in Derivatives

Since it is clear that recent global crisis was caused initially by derivative securities in USA, it is not surprising when Financial Accounting Standards Board (FASB) finally

issued SFAS 161 in March 2008, "*Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities*", which expands disclosures about derivative instruments and hedging activities. This new statement amends SFAS 133, "*Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities*", 63 which established the basic rules governing derivatives. Issuers must now disclose the fair values of derivatives and their gains and losses in a tabular format, which should enable investors to better assess the contribution of derivatives to earnings and financial risk. In addition, companies must now reveal more information about risk exposure (e.g., interest rate, credit, foreign-exchange rate, overall price), and distinguish between derivatives used for risk management and those used for speculation. These include: (a) how and why an entity uses derivative instruments, (b) how derivative instruments and related hedged items are accounted for under Statement [133] and related interpretations, (c) how derivative instruments and related hedged items affect an entity's financial position, financial performance, and cash flows<sup>4</sup>. Accountants now should be able to discuss not only how management should disclose risks on derivatives, but also the probability of future management's preferences and intentions towards derivative instruments.

### II.2. Ethics and Regulation

Increasing pressures on accountants as well as auditors role in providing comprehensive information to public raises one more question: where have the ethics gone? The regulatory bodies have imposed professional conducts and code of ethics for nearly all-accounting professions, from auditors, management accountants, to internal auditors. Re-examining the effectiveness and changing role of ethics in today's globally competitive environment has again become an important focus, especially regarding how it should be developed to shape future accountants' behavior and attitude preferences—most importantly, for internal corporate accountants, where it all begins.

### Ethics Course for Accountants and Accounting Students: an Unlikely Proposal

Accounting professions become seemingly notorious every time business environments are jeopardized by corporate and market scandals. Accountants tend to be misjudged and accused as contributory parties even though they formerly did not receive much attention when it came to usual corporate or management's financial decisions.

As the basic moral standards, many regulatory bodies have established written ethics. For instances, Institute of Internal Auditors (The IIA) stated in International Professional Practices Framework (IPPF) mentioned Integrity, Objectivity, Confidentiality, and Competency as its ethics principles. According to International Federation of

Accountants (IFAC) Code of Ethics, professional accountants are required to comply with similar fundamental principles: Integrity, Objectivity, Professional Competence and Due Care, and Confidentiality. Those bodies, as well as Institute of Management Accountants (IMA) and other accounting bodies like American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) in USA, emphasize on accountants' responsibility towards public interests. In the end though, the scandalous financial reporting involving accountants seems unbearably reoccurring.

The ideas of ethics courses inclusion in accounting come to rise. As if it is not enough, ethics education in accounting curriculum is seriously considered. But then, do they really work? David F. Bean and Richard A. Bernardi (2007) have scrutinized this idea. They are deeply concerned that ethics courses are challenged while the place of other courses in the curriculum goes unexamined. They believe that if academia continues to collectively oppose a course in accounting ethics, it would be in the accounting profession's best interest to create and offer its own accounting ethics course as a precondition of entry to the profession<sup>5</sup>. And as one of their concluding remarks, they stated that: *"Certainly no single ethics course or group of ethics courses can guarantee that students will always behave and act ethically. Individuals would probably concur, however, that the probability of correct and ethical choices increases with increased education in these particular subject areas. An accounting ethics course should lessen the frequency and severity of ethical lapses in the profession."*

### II.3. The Need of Powerful Standards

As explained before, all of this time, people are focusing on the works of public accountants in expressing opinions towards financial reporting. Internal corporate accountants are viewed to have small power in making financial decisions as they work for management, and therefore the awareness of public interests is considerably small. But, since the concerns of valuation and derivative risks come to the surface, people should not put the blame merely on auditors' capability. It is crucial to put an eye on the role of corporate accountants. They should have more bargaining power and increase their professional assessments on financial decision making. Like the basic logical thinking that could be used as an analogy says: *"Good internal control prevents more embezzlements than good auditors find"*<sup>6</sup>. Corporate accountants as insiders in the company could help auditors to fulfill their responsibilities to the public interest.

Ethical constraints will not be significantly effective since they are working inside their own corporate cultures that potentially lessen their independency. One powerful force that could equip corporate accountants to intensify their professionalism is the

accounting standards themselves. Strong accounting standards with thoroughly complete principles and rules would most likely assist them in discussing best accounting treatments and policies for managements to comply. If the accountants have wrong intentions along with the managements to finalize financial reports, strong standards could at least minimize their spaces in doing fraudulent statements.

### Escalating Corporate Accountants' Professionalism while Facing IFRS Convergence

The opportunities to develop more powerful standards in a concrete form are challenged by a global convergence of accounting standards. International Financial Reporting Standards (IFRS) has been through integration process in many, if not most, countries in the world to standardize international financial reports to ease cross-border transactions, investments, and common economic decisions since business has been going global and integrated (clearly explained by the contagion effect of financial crisis). The integrated standards should be evaluated to prevent future crises arising from financial misconducts—especially standards related to specific risk reporting on valuation and derivatives.

### III. Evaluating and Empowering IFRS

Financial reporting has focused on the financial performance and financial position of an entity which can be described as how well a firm is going and how effectively the management has managed the resources of the firm. Currently, the scope of financial reporting has expanded to include the risk faced by business enterprises. Some of the requirements risk reporting has been mandated in accounting standards such as IFRS 7 on Financial Instruments: Disclosures.

Broadly speaking, IFRS is designed for the general-purpose financial statements of profit oriented entities. General purpose financial statements give information about financial performance, position and cash flow that is useful for making economic decisions by range of users including shareholders, creditors, employees, and the general public—with the emphasis on understandable and enforceable global accounting standards with high quality, transparent, and comparable information in financial statements and other financial reporting to work actively with national standard-setters to bring about convergence of national accounting standards and IFRS to high quality solutions (Choi and Meek, 2007).

Associated with the global financial crisis, IFRS has a role in revealing disclosure in

two areas of risk: valuation of a company and disclosure of derivative instruments, which in recent decades become the main triggers of the global financial crisis.

### Quality of Earnings: Value Relevance and Predictive Ability

Valuation of a company closely linked to the quality of earnings derived from the accounting side. Earnings are a figure which shows the results of operations in a company within a certain time period. Earnings are typically used by investors, both existing investors and potential investors, in assessing the performance of a company. In order to evaluate the performance of a company, any earnings generated should be qualified. Earnings quality is reflected in the number of properties inherent in a value of reported earnings so the quality of earnings to be one thing to be considered in accounting. On a small scale, errors in assessing company's earnings will bring losses to investors. Investors will incur a loss if the company where he invested was not a qualified and profitable company.

Income is an important component in analyzing a company's prospects and performance. The value of income is generated by the company from recording company transactions within a certain time based on an accounting standard. Therefore, the value of reported earnings will depend also on the accounting standards used. From the value of earnings generated by companies that use accounting standards, the quality of earnings resulting from an entity can be measured.

The quality accounting standards will result in a quality of earnings value as well. Profit itself is financial information. The financial information will be useful for users if they have certain properties. These properties are compiled based on the market (market-based attributes) and are based on accounting (accounting-based attributes). There are many literatures on earnings quality. One study conducted by Van Der Meulen et al. (2007), measuring the quality of earnings by using four attributes of value relevance, timeliness, predictive ability, and quality of accruals. Value relevance and timeliness are used to measure the properties of earnings quality based on the market (market-based attributes), while the predictive ability and the quality shows the nature of accrual accounting earnings quality based on (accounting-based attributes).

The calculation of the value of profits is obtained by the entity's revenue within a certain period. Broadly speaking, the profit obtained by reducing the revenue of an entity with expenses that occur in the same period of revenue. Thread that can be summed up thus far is that the determination of earnings is strongly influenced by the concept of revenue recognition in an entity. Precisely the recognition of income will determine the

quality of earnings. Earnings quality is described by the value relevance which explains the extent to which returns on the basis of accounting reflecting the stock return, and also predictive abilities that describe the extent to which profits generated to reflect the operating cash flow next year. In other words, predictive ability shows the ability of earnings in predicting future cash flows. This quality of earnings are expected that capital provider of an entity will not experience the error in predicting the model used to investment decisions. Investors' errors in making decisions will bring long-term impact that is quite significant, example of the global financial crisis when it occurs widely.

Revenue recognition (based on IAS 18) is not a straightforward process because of the wide range of different business revenue-generating activities and circumstances. Companies must be able to look at the risks overstatement of revenue from their managers. Overstatement of revenue may occur related to the bonus policy that is based on revenue obtained, earnings management, and fraud that occurred in the company. That's why the recognition of revenue becomes a crucial point in a company's financial reporting. Although the recognition of revenue is not a straight forward process, there are some important points in the revenue recognition criteria. These standards focus on three things: measurability of asset value, existence of a transaction, and substantial of earning process (Godfrey, 2010). Those three things should make a proper recognition of revenue so that the information contained in financial statements to be no bias for the user in making decisions. With the implementation of IAS 18 as guidance on revenue recognition, companies must consider the critical recognition points appropriately so as not to bring any adverse systemic effects, especially for users of information in corporate financial reporting.

In addition to IAS 18, one of the standards that affect the determination of the quality of corporate earnings is IAS 16 on property, plant, and equipment. The objective of IAS 16 is to prescribe the accounting treatment for property, plant, and equipment. The principal issues are the recognition of assets, the determination of their carrying amounts, and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. These standards especially important to minimize the practice of income smoothing in the company related to the recognition of depreciation expense charged by the company in connection with the ownership of the assets of a company. With the implementation of IAS 16, companies are required to perform impairment from assets held if it deemed appropriate. Impairment loss as a part of company's expenses will be reflected fully in the company's income statement. Thus, it can be concluded that the



application of these standards force companies to disclose how much load is actually happening and will indirectly reduce the practice of income smoothing. Provisions contained in IAS 18 and IAS 16 as one of the guidelines in the calculation of earnings are considered to be effective compared with other existing standards. Thus, the use of IFRS is expected to improve the quality of corporate earnings so that the information in financial reporting tends to not be biased to make decisions.

#### Derivative Instruments

Risk management and disclosure related to derivative financial instruments are urgently needed. Accounting for derivative instruments depends on purpose for entering into derivative contracts. It is important from accounting point of view to understand what constitutes a derivative and the reasons of a company enter into contracts involving derivative.

Many financial contracts such as derivative financial instruments are executory contracts and are off-balance sheet, and carry significant risk because of lack of disclosure. What becomes the next question is: should the financial obligations under these contracts are recognized in the balance sheet? If investors and users of financial statements are to properly understand the financial instruments for decision-making as well as the assessment of risk, it is important that there is consistent accounting and adequate disclosure of such instruments.

According to IAS 39, transactions in financial instruments resulted in the company bear or transfer to other parties' one or more existing financial risk. IAS 39 describes the recognition and measurement of financial instruments. Before IAS 39 is applied, many entities are on pros and cons.

Real case in Indonesia could be a good example. Before the implementation of PSAK 50 and 55 concerning financial instruments (adopted from IAS 32 and 39), Indonesian banks can classify the related allowance for credit from financial instruments held under the rules of central banks that are not quite superior. For example, banks are required to make provision (allowance) against the current credit of 1%, and for other loans such as special credit of 5%. After the implementation of PSAK 50 and 55, the Indonesian banking system should review one by one credit that is owned and view the cash flow projection of loan payment for the future, especially for credits in the threshold area. Thus, it can be concluded that the application of IAS 32 and 39 are expected to make banking industry properly classify a financial instrument that makes the decision makers not wrong in making investment decisions.

IAS 32 is also requesting disclosure of extensive reporting of financial instruments. Standards governing disclosure of financial instruments today are IFRS 7, which replaces IAS 30. Disclosures of financial instruments are expected to explain the significance of financial instruments for an entity that has financial instruments and investors. Therefore, users of financial statements, such as investors, are entitled to extensive disclosure in assessing the level of risk associated with financial instruments. The purpose of this disclosure is to provide information to enhance understanding of the significance of financial instruments on financial position, performance, and cash flows of the company, as well as evaluating the amount, timing, and certainty of future cash flows associated with these derivative financial instruments. With the level of reasonable certainty, it is expected to encourage users of financial statements not to make wrong investment decisions relating to derivative financial instruments.

#### IV. Conclusion

Financial crisis in relation with the accountants was simply a case of blaming the messenger. Fair value accounting was not a very underlying cause of this financial crisis. Rather, the problem lied on how the accountants communicated the effects of such bad decisions in granting subprime loans and writing credit default swaps<sup>7</sup>. Fair value accounting is an appropriate measurement; only the application of the measurement was not right. Accountants must know what their responsibilities are and must not stop at the boundaries of accounting practice. They need to see all the risks related with the conditions and also not forget to re-strengthen their position in collaboration with other decision makers. IFRS as the new standards this far has provided better frameworks and principles to assist accountants in making critical decisions along with the managements—especially related to two concerns that are considered as the biggest sources of crisis: valuation and derivative disclosures. Since business is getting more integrated like never before, the adoption of IFRS and further discussions according to the relevance of the principles to the reality should be empowered. IFRS is expected to be a true accountant's language of business to public interest, a shield to defend and a weapon to attack to increase bargaining power before the management.

#### REFERENCE

Apostolou, Barbara & Nicholas G. Apostolou. 2008. Derivatives: New Disclosures Required. In *The CPA Journal – November* (pp.28-36).

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2009. *Auditing and Assurance Services*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Bean, David F. & Richard A. Bernardi. 2007. *Accounting Ethics Courses: Do They Work?* In *The CPA Journal Online*  
[www.nyscpa.org/cpajournal/2007/107/essentials/p64.htm](http://www.nyscpa.org/cpajournal/2007/107/essentials/p64.htm)
- Holtzman, Mark P. 2007. *Reporting Critical Accounting Policies*. In *The CPA Journal Online* <http://www.nyscpa.org/cpajournal/2007/1207/essentials/p42.htm>
- Kranacher, Mary-Jo. 2011. *Full Disclosure: All Investors Need to Know*. In *The CPA Journal - April* (p.80).
- Tan, Pearl & Peter Lee. 2009. *Advance Financial Accounting with IAS & IFRS*. Boston: McGraw-Hill
- Trussel, John M. & Laura C. Rose. 2009. *Fair Value Accounting and the Current Financial Crisis*. In *The CPA Journal - June* (pp.26-30).  
[http://app1.hkicpa.org/hk/APLUS/0812/Fair\\_value\\_KPMG.pdf](http://app1.hkicpa.org/hk/APLUS/0812/Fair_value_KPMG.pdf)  
<http://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-crisis/ar/1>  
<http://dealbook.nytimes.com/2008/07/01/blaming-the-bean-counters/>  
<http://www.iasplus.com/standard/ias16.htm>  
<http://www.iasplus.com/standard/ifrs07.htm>  
<http://www.iasplus.com/standard/ifrs07.htm>  
<http://www.iasplus.com/standard/ias16.htm>  
<http://www.forceforgood.com/Blogs/The-accounting-profession-and-its-role-in-the-financial-crisis--247/1.aspx>

#### FOOTNOTES

- 1) Kranacher, Mary-Jo. 2011. *Full Disclosure: All Investors Need to Know*. In *The CPA Journal - April* (p.80).  
*Holtzman, Mark P. 2007. Reporting Critical Accounting Policies*. In *The CPA Journal Online*
- 2) <http://www.nyscpa.org/cpajournal/2007/1207/essentials/p42.htm>
- 3) Trussel, John M. & Laura C. Rose. 2009. *Fair Value Accounting and the Current Financial Crisis*. In *The CPA Journal - June* (pp.26-30).
- 4) Apostolou, Barbara & Nicholas G. Apostolou. 2008. *Derivatives: New Disclosures Required*. In *The CPA Journal - November* (pp.28-36).
- 5) Bean, David F. & Richard A. Bernardi. 2007. *Accounting Ethics Courses: Do They Work?* In *The CPA Journal Online* [www.nyscpa.org/cpajournal/2007/107/essentials/p64.htm](http://www.nyscpa.org/cpajournal/2007/107/essentials/p64.htm)
- 6) Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2009. *Auditing and Assurance Services*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- 7) Lisa Koonce, an accounting professor at the University of Texas, wrote in *Texas* magazine, as also published in <http://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-crisis/ar/1>

## Siasat *Shock Doctrine*: Kapitalisme Memanfaatkan Krisis

Triasa A. Laksana

Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI

Judul Buku	: Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism
Penulis	: Naomi Klein
Penerbit	: Picador
Tahun Penerbitan	: 2008
Bahasa	: Inggris

Setelah sukses dengan buku pertamanya "*No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*," yang telah diterbitkan dalam 28 bahasa dan meraih *international bestseller*, kini masih dengan gaya penulisan dan tema pembahasan yang hampir sama, jurnalis asal Kanada sekaligus penulis ini menerbitkan buku yang berjudul "*The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*."

Buku setebal 701 halaman yang diterbitkan oleh Picador ini berisi investigasinya tentang bagaimana dan untuk apa kapitalisme bekerja. Klein mampu menyuguhkan satu cerita ke cerita lainnya secara rapi hingga dapat memberikan sebuah gambaran benang merah atas apa yang terjadi di dunia selama 50 tahun belakangan ini. Buku ini menguak tentang peranan kaum kapitalis yang berada di balik layar atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara-negara belahan dunia lainnya.

\*\*\*\*\*

Memang perdebatan tentang baik dan buruknya kapitalisme telah menjadi sorotan bahkan sejak ide ini lahir dahulu. Secara empiris, ideologi ini terus menerus diperdebatkan.

*"I don't want to abolish government. I simply want to reduce it to the size where i can drag it into a bathroom and drown it in the bathtub"*

Kalimat yang diucapkan oleh Grover Norquist itulah yang kiranya mampu



**Mini  
Economica**  
media komunikasi ilmu ekonomi

B 1.c.6 (b)  
Pengganti ongkos cetak  
Rp 15.000,-

Edisi 38 – Tahun 2011

**Jatuhnya Rezim Kurs Devisa Tetap Cina: Sebuah  
Prediksi**

*Yuliana Safriani*

***Share Price Reaction, Liquidity, and Volatility in Stock  
Market Liberalization Period: Emerging Countries  
Survey***

*Fadel Akbar*

***Examining the Contract Labor System in Creating  
Synergic Industrial Relations***

*M. Fadel Noorsal and Riani Rachmawati*

**Standar Akuntansi: Mewujudkan Laporan Keuangan  
yang Berkualitas**

*Dwi Martani*

***Role of Accountants amidst Economic Turbulence:  
Evaluating Standards to Enforce and Empower Internal  
Corporate Accountants in Critical Decision Making***

*Akhir Syabani, Saras Amalia Kartika, and Siti Farida*

**Siasat Shock Doctrine: Kapitalisme Memanfaatkan Krisis**

*Triasa A. Laksana*



Pemimpin Redaksi  
Januarius Rettob

Redaktur Pelaksana  
David Christian

Wakil Redaktur Pelaksana  
Pandu Wicaksono

Tim Redaksi  
Bayu Wirawan  
Nadya Priscilya  
Hosianna Situmorang  
Marizza Ovani Malau  
Nanda Rizki Fauziah

Sirkulasi, Iklan & Pemasaran  
Edo Irfandi  
Atrifia Aulia

Produksi  
Muhamad Faris Marino

Desain dan Tata Letak  
Sabrina Nurul Afyani

Penanggung Jawab/Pengurus Inti  
Triasa A. Laksana  
Tantiana M. Cahyani  
Ranisa Primastuti

ALAMAT REDAKSI  
Badan Otonom Economica  
Fakultas Ekonomi Universitas  
Indonesia  
Lantai Dasar Student Center FEUI  
Kampus Baru UI Depok 16424  
Telp: (021) 786-3554  
Fax: (021) 786-5084

*Redaksi mengundang para mahasiswa untuk menggunakan media ini sebagai wadah analisa dan tanggapan terhadap ilmu-ilmu ekonomi. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pendapat Badan Otonom Economica*

Diterbitkan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang tergabung dalam Badan Otonom Economica

## Sambutan Dekan

1

Badan Otonom Economica kembali menghadirkan Mini Economica untuk yang ke-38 kalinya. Mini Economica merupakan majalah ilmiah yang berisi tulisan-tulisan ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis yang ditulis oleh mahasiswa, akademisi, dan dosen. Sebuah usaha yang sangat mulia tentunya.

Mini Economica merupakan salah satu dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Badan Otonom Economica. Oleh Badan Otonom Economica, karya ini ditujukan untuk membangkitkan kembali semangat idealisme mahasiswa yang dirasa telah luntur akibat berbagai hal yang telah mengalihkan pandangan dan kepedulian terhadap kondisi sosial-ekonomi di Indonesia. Karya ini diharapkan dapat menjadi penambah "gairah" bagi tonggak pergerakan mahasiswa di Indonesia.

Di dalam majalah ilmiah Mini Economica ini, berbagai sumbangan pemikiran-pemikiran khas mahasiswa mengenai bagaimana Indonesia dan dunia seharusnya, ditumpahkan. Karya ini akan menjadi bukti bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas bahwa dengan menulis juga dapat menjadi jalan yang efektif dan elegan bagi mahasiswa – sebagai kaum intelektual – dalam bersuara dan berpendapat demi Indonesia dan dunia yang lebih baik. Sebuah tulisan dapat membentuk pemikiran puluhan atau ratusan mahasiswa lainnya.

Dengan bangga, kami mengucapkan selamat kepada Badan Otonom Economica atas terbitnya Mini Economica 38. Semoga Mini Economica dapat menjadi inspirasi dan pembuka pikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

Dekan FEUI

Prof. Firmanzah, Ph.D

Belum juga berlalu dampak negatif dari krisis ekonomi global tahun 2008, dunia kembali dihantam krisis ekonomi yang lain di tahun 2011. Kita menyaksikan suatu pemandangan yang mengerikan di Eropa sebagai akibat masalah *sovereign debt* yang dialami oleh beberapa negara anggota Eurozone, khususnya Yunani, Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Bahkan beberapa di antara negara-negara tersebut saat ini terancam *default*. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, prospek perekonomian tidak juga terlihat cerah. Efek negatif dari krisis yang terjadi di dunia barat pun tidak menutup kemungkinan akan menyebar ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Sebagai kaum akademisi Indonesia – baik mahasiswa ataupun dosen – khususnya di bidang ekonomi, sudah seharusnya kita menjalankan peran kita untuk mencermati sistem yang ada dan mengamati kondisi yang terjadi dengan kacamata objektif agar bisa memberikan peran yang nyata bagi pemulihan negara ini, terutama dari aspek ekonomi. Untuk itu, jurnal ilmiah Mini Economica kembali hadir di edisi ke-38, dengan mengangkat beberapa isu yang terkait dengan ekonomi baik dalam lingkup mikro maupun makro.

Ada enam tulisan yang ditampilkan pada jurnal ilmiah Mini Economica edisi ke-38. Pada tulisan pertama, Yuliana Safriani mengajak para pembaca untuk mencermati kondisi perekonomian di Cina. Tulisan ini akan menganalisis kondisi neraca perdagangan Cina, yang terpengaruh dari segi ekspornya oleh krisis ekonomi global tahun 2008 yang bersumber dari Amerika Serikat.

Pada tulisan berikutnya, Fadel Akbar menyoroti dampak liberalisasi pasar saham di negara berkembang, terhadap *share price reaction*, *liquidity*, serta *volatility* saham. Analisis ini akan membahas apakah liberalisasi pasar saham memang secara langsung mempengaruhi ketiga hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan *cost of capital* selama periode liberalisasi, faktor-faktor yang meningkatkan likuiditas, serta masalah-masalah yang disebabkan peningkatan volatilitas di pasar saham sebagai akibat dari liberalisasi pasar saham.

Selanjutnya, Fadel M. Noorsal dan Riani Rachmawati dalam tulisan berikutnya mencermati sistem kontrak tenaga kerja di Indonesia serta kaitannya dengan sektor industri di Indonesia. Mereka menganalisis penggunaan *flexible labor system* mempengaruhi tingkat *employment* di Indonesia dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dari sudut pandang akuntansi, Dwi Martani menjelaskan mengenai Standar Akuntansi, khususnya bagaimana mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam tulisannya, penulis menjabarkan mengenai PSAK, PSAK Syariah, serta PSAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Selain itu, hal-hal terkait Standar Akuntansi Pemerintah yang benar juga diangkat pada tulisan ini.

Masih seputar akuntansi, Akhir Syabani, Saras Amalia Kartika, dan Siti Farida pada tulisan berikutnya yang berjudul “*Evaluating Standards to Enforce and Empower Internal Corporate Accountants in Critical Decision Making*” membahas bagaimana seharusnya peran akuntan dalam periode ketidakstabilan ekonomi.

Terakhir, pada rubrik resensi buku, Triasa A. Laksana mengamati buku berjudul *Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*, karangan Naomi Klein. Buku ini membahas mengenai peran kapitalisme serta cara bekerja kapitalisme di dunia ini, serta menguak bagaimana peran kaum kapitalis dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia.

Semoga Mini Economica 38 dapat menyumbangkan pandangan kaum intelektual dari segi ilmiah untuk terus memberikan kemajuan bagi bangsa ini.

### ESAI

- Jatuhnya Rezim Kurs Devisa Tetap Cina: Sebuah Prediksi**  
*Yuliana Safriani* 4
- Share Price Reaction, Liquidity, and Volatility in Stock Market Liberalization Period: Emerging Countries Survey**  
*Fadel Akbar* 15
- Examining the Contract Labor System in Creating Synergic Industrial Relations**  
*M. Fadel Noorsal and Riani Rachmawati* 44
- Standar Akuntansi: Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas**  
*Dwi Martani* 52
- Role of Accountants amidst Economic Turbulence: Evaluating Standards to Enforce and Empower Internal Corporate Accountants in Critical Decision Making**  
*Akhir Syabani, Saras Amalia Kartika, and Siti Farida* 60
- RESENSI BUKU**
- Siasat Shock Doctrine: Kapitalisme Memanfaatkan Krisis**  
*Triasa A. Laksana* 71